






DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian


	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Pahlawan KM. 6 Rowosuko Rajin Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 www.feb.uinpgudur.ac.id email: febl@iainpekalongan.ac.id</small></p>
<p>Nomor : B-1360/In.30/F.IV/TL.00/11/2022 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>	<p>02 November 2022</p>
<p>Yth. Kepala Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Ditempat</p> <p>Assalamu'alaikum W. Wb.</p> <p style="text-align: center;">Diberitahukan dengan hormat bahwa:</p> <p>Nama : Umi Kharifah Finayanti NIM : 4318116 Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p>Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare)"</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.</p> <p>Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.</p> <p>Wassalamu'alaikum W. Wb.</p>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p style="font-size: small;">Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H. M.H NIP. 197502201999032001 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> </div>



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
KEPALA DESA SIDOKARE
 Jl. Raya Sidokare No. 15 Kecamatan Ampelgading-Kode Pos 52364

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
 Nomor : 470 / 556 / XII / 2022


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa:


Nama	: UMI KHAFIFAH FINAYANTI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pemalang, 20 Juli 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 4318116
Jurusan/Prodi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Desa Sidokare Rt.022 Rw. 005 Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)
Waktu Lama Penelitian	: 1 (satu) Bulan
Tempat Penelitian	: Desa Sidokare

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, untuk penyelesaian tugas skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar bisa digunakan bagi yang bersangkutan.

Atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sidokare, 14 Desember 2022.
 An. Kepala Desa Sidokare

KUSWONO



Lampiran 3. Informasi Narasumber

No	Nama	Jabatan	Tempat/tanggal Lahir
1.	Kuswono	Kepala Desa	Pemalang, 12/08/1968
2.	Mohammad Syukur	Sekretaris Desa	Pemalang, 09/08/1986
3.	Ulya Wusiro Solikhati	Bendahara	Pemalang, 25/04/1999
4.	Mustika Setyanigrum	Kaur Perencanaan	Pemalang, 17/10/1988
5.	Sonhaji	BPD	Pemalang, 12/02/1965
6.	Imam Prasetya	Masyarakat Desa Sidokare	Pemalang, 17/06/1982

Lampiran 4. Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator SPIP- Pengelolaan Dana Desa	Deskripsi	Pelaksanaan Indikator	Dokumen
1.	Lingkungan pengendalian	Kondisi dalam instansi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal.	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan integritas dan nilai etika - Komitmen - Kepimimpinan yang kondusif - Pembentukan struktur organisasi - Pendelegasian wewenang - Kebijakan yang sehat 	Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) berdasarkan tahun anggaran.

			<ul style="list-style-type: none"> - Aparat pengawasan yang efektif - Hubungan kerja yang baik 	
2.	Penilaian risiko	Kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan tujuan instansi - Penetapan tujuan kegiatan - Identifikasi risiko - Analisis risiko 	Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) berdasarkan tahun anggaran.
3.	Kegiatan pengendalian	Suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi sebuah risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan dilaksanakan secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan kerja instansi - Pembinaan sumber daya manusia - Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi - Pengendalian fisik stas asset - Penetapan dan peninjauan indikator dan ukuran kerja 	Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) berdasarkan tahun anggaran.

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemisahan fungsi - Otoritas atas transaksi dan kejadian penting - Pencatatan transaksi dan kejadian yang akurat dan tepat waktu - Pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya - Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya - Dokumentasi yang baik 	
4.	Informasi dan komunikasi	Data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dan memanfaatkan sarana komunikasi - Mengelola dan mengembangkan serta memperbarui 	Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) berdasarkan tahun anggaran.

			sistem informasi secara terus-menerus	
5.	Pemantauan	Proses penilaian mutu kerja pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan berkelanjutan - Evaluasi - Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review 	Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) berdasarkan tahun anggaran.
6.	Perencanaan	Kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dimasa mendatang.	Musyawaharah desa diikuti Oleh BPD dan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMDesa - RKPDesa
7.	Pelaksanaan	Proses pencatatan semua transaksi pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana Kegiatan - Sekretaris Desa - Kepala Desa 	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8.	Penatausahaan	Kegiatan dalam menentukan pengelolaan keuangan secara terstruktur berdasarkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kaur Keuangan - Kepala Desa 	Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Pajak

		standar, prinsip serta prosedur yang telah ditetapkan.		
9.	Pelaporan	Penyampaian laporan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> - Kaur Keuangan - Sekretaris Desa - Kepala Desa 	Laporan Realisasi Anggaran
10.	Pertanggungjawaban	Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Desa - Kepala Desa 	Laporan Keuangan: LRA dan CALK, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Kegiatan Sektoral

Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang”. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan pada responden aparatur desa Sidokare, yaitu:

Nama Narasumber : Bapak Kuswono
Jabatan : Kepala Desa Sidokare
Tanggal : November 2022
Tempat : Kantor Desa Sidokare

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana kepala desa menyusun dan menerapkan kebijakan/peraturan dalam penegakan integritas dan etika pada instansi?
2. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang pada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa dalam menanggapi masukan yang diberikan masyarakat terhadap pembangunan desa?
4. Apakah pemerintah desa mempunyai struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah kepala desa dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai sudah tepat?
6. Bagaimana pemerintah desa Sidokare dalam memberdayakan masyarakat desa?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel?
8. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana pemerintah desa Sidokare dalam mengatasi adanya risiko tersebut?

10. Bagaimana pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dana desa?
11. Apakah pemeritah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku?
12. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?
13. Bagaimana kepala desa dalam memberikan informasi sebagai bentuk laporan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan dana desa?
14. Bagaimana bentuk pemantauan pemerintah desa Sidokare terhadap pelaksanaan program pembangunan desa?
15. Apa saja prioritas penggunaan dana desa di desa Sidokare?

Nama Narasumber : Bapak Mohammad Syukur
Jabatan : Sekretaris Desa
Tanggal : 8 dan 16 November 2022
Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tahapan penyusunan anggaran desa di desa Sidokare?
2. Apa saja jenis pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana desa di desa Sidokare?
4. Bagaimana prosedur penatausahaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare?
5. Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?
6. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare?
7. Bagaimana pengendalian atau tindakan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dana desa?
8. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan pembangunan desa?
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare pada pengelolaan dana desa?
10. Apakah pembangunan di desa Sidokare tahun 2021 sudah terealisasi semua?

Nama Narasumber : Ibu Ulya Wusiro Solikhati
Jabatan : Bendahara/Kaur Keuangan
Tanggal : 8 November 2022
Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dana desa pada pemerintah desa Sidokare?
2. Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?
3. Apa saja laporan pertanggungjawaban yang di buat bendahara dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa Sidokare dalam pengelolaan dana desa?
5. Apa saja hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa

Nama Narasumber : Mustika Setyaningrum
Jabatan : Kaur Perencanaan
Tanggal : 16 November 2022
Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana laporan perencanaan yang dibuat pemerintah desa Sidokare terkait pengelolaan dana desa?
2. Apakah ada hambatan dalam penyusunan laporan perencanaan pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare?

Nama Narasumber : Sonhaji
Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tanggal Wawancara : 8 November 2022
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sonhaji

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran BPD dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sidokare?
2. Bagaimana peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sidokare?

Nama Narasumber : Imam Prasetya
Sebagai : Masyarakat Desa Sidokare
Tanggal Wawancara : 8 November 2022
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Imam Prasetya

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Sidokare?
2. Bagaimana masyarakat melaporkan bentuk penyimpangan pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare?
3. Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran desa?

Lampiran 6. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Kuswono

Jabatan : Kepala Desa

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa Sidokare menyusun dan menerapkan kebijakan/ peraturan dalam rangka penegakan integritas dan etika pada instansi?	Pemerintahan desa menyusun kebijakan dengan sistemnya musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan tim, termasuk tim TPK dan perangkat desa. Ini dibuat sesuai dengan peraturan Bupati maupun Pemerintah pusat. Kalau tidak sesuai otomatisakan menyalahgunakan.
2.	Bagaimana pembagian tugas dan wewenang pada pemerintahan desa Sidokare dalam pengelolaan dana desa?	Untuk pengelolaan dana desa yang jelas dikelola oleh Bendahara desa. Apabila dana desa keluar itu yang mengambil bendahara desa. Setelah kegiatan dimulai yang mengerjakan langsung TPK pengelola kegiatan tersebut. Fungsi-fungsinya ada, fungsinya TPK untuk mengelola pekerjaan, juga ada anggotanya untuk mengawasi pekerjaan tersebut, jangan sampai pekerjaannya tidak sesuai dengan perencanaan.
3.	Bagaimana pemerintah desa dalam menanggapi masukan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah desa?	Ya Alhamdulillah apabila ada masyarakat yang memberikan saran, kritikan saya terima dengan senang hati. Berarti ada istilahnya sama-sama untuk membangun desa. Sehingga kita selalu hati-hati. Apabila dari masyarakat ada kritik ke desa, jujur saya senang, berarti benar-benar memperhatikan adanya pembangunan desa Sidokare.

4.	Apakah pemerintah desa mempunyai struktur organisasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa?	Yang jelas dalam struktur organisasi ada, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan juga bendahara desa. Untuk dilapangan tetap TPK yang bantu langsung.
5.	Apakah kepala desa dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai sudah tepat?	Iya sudah sesuai dengan pedoman. Yang jelas kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada.
6.	Bagaimana pemerintah desa Sidokare dalam memberdayakan masyarakat desa?	Masyarakat diberikan arahan dari kepala desa dan juga dibantu BPD. Disini juga ada pelatihan menjahit, ada pelatihan mengelas, ada pembuatan pupuk organik.
7.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel?	Ya Alhamdulillah dengan adanya pembangunan desa kita suruh petugasnya untuk mengawasi pekerja yang melakukan pekerjaan dan juga dari unsur masyarakat juga ikut mengawasi pekerjaan. Sedangkan biar ada ketransparan ada istilahnya spanduk ya juga ada. Ada papan informasi, dibuatkan papan informasi kurang lebih ada 4, di desa Sidokare Selatan dan Utara.
8.	Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembagunan desa dalam pengelolaan dana desa?	Ya Alhamdulillah tindakan dari kepala desa ya <i>sing</i> pernah terjadi kita unsur masyarakat lingkungan yang <i>pas</i> kebetulan ada proyeknya, kita dikumpulkan, kita diberi arahan tetap yang kasih arahan kepala desa tetap didampingi oleh pengurus-pengurus dari pekerjaan, terutama dari ketua BPD.
9.	Bagaimana pemerintah desa Sidokare dalam mengatasi risiko tersebut?	Kalau mengatasi masalah hal pekerjaan yang ada risikonya ya tetap kita diundang, dimusyawarahkan. Nah musyawarah tersebut agar kita mendapat kemufakatan bersama, sehingga

		tidak ada gejolak apapun. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang ini ya berjalan dengan lancar tidak ada hambatan apapun.
10.	Bagaimana pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dana desa?	Cara pencegahan berarti begitu ada istilahnya pekerjaan mau dimulai, kita diambil seperti hal yang kebutuhan. Contoh, misalnya ada pembelanjaan kita begitu pembelanjaan sesuai dengan kwitansinya yang diberikan. Misalnya belanjanya 5 juta atau 10 juta dikasih 10 juta. <i>Sing</i> penting bentuk kwitansi yang ada sesuai. Jadi <i>ndak</i> semudah itu mengeluarkan istilahnya keuangan, <i>sing</i> penting ada bentuk kwitansi belanja-belanja baru kita laksanakan. Harus ada buktinya.
11.	Apakah pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku?	Alhamdulillah insyaAllah sesuai dengan pedoman.
12.	Bagaimana bentuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?	Ya untuk mengevaluasi pembangunan desa setelah pekerjaan kita mulai tetap ada tim untuk mengawasi TPHP, berarti ikut melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, biar pekerjaan sesuai dengan RABnya jangan sampai menyimpang.
13.	Bagaimana kepala desa dalam memberikan informasi sebagai bentuk laporan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan desa?	Kita dibuatkan jenis <i>anu</i> papan informasi. Papan dipinggir jalan. Rinciannya ya ada dana ini dana desa pokoknya lengkap. Ada dokumentasi juga.

14.	Bagaimana bentuk pemantauan pemerintah desa Sidokare terhadap pelaksanaan program pembangunan desa?	Saat ini terus terang masalah pekerjaan kita diupayakan harus swakelola. Swakelola tersebut Alhamdulillah masyarakat desa Sidokare bekerjanya benar-benar giat mba. Kalau <i>toh</i> kita ada yang istilahnya pekerja kurang baik kita tegur kasih saran, <i>marilah kita membangun desa demi kemajuan desa Sidokare</i> , sehingga masyarakat akhirnya semangat bekerja karena benar-benar niatnya membangun desa. Ini pekerjaanya diambil dari desa semua.
15.	Apa saja prioritas penggunaan dana desa di desa Sidokare?	Saat <i>iki</i> berarti dana desa untuk pembangunan fisik, untuk penanganan covid yang kemarin juga ada, pemberdayaan masyarakat juga ada.

Nama Narasumber : Bapak Mohammad Syukur

Jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal Wawancara : 8 dan 16 November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tahapan penyusunan anggaran desa di desa Sidokare?	Itu yang pertama menyusun RPJM. Kemudian yang berikutnya menyusun RKPDesa. Dan yang terakhir dituangkan dalam APBDesa. RPJM itu berlaku enam tahunan, itu sesuai dengan masa kerja kepala desa. Jadi, dalam RPJM itu sudah disusun pertahun. Kemudian tiap tahunnya dituangkan atau dimusdeskan atau dirapatkan di RKPDesa bersama warga. Kemudian untuk penetapan APBDes itu ada musyawarah dengan BPD.
2.	Apa saja jenis pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Pelaporannya berarti, kalau keuangannya itu ada Siskedes (Sistem Informasi Keuangan Desa) itu laporannya langsung dengan pusat. Kemudian ada LPJ, laporan yang disusun dengan istilahnya dengan menyetarkan bukti-bukti pengeluaran belanja dan bukti dukung lainnya.
3.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana desa di desa Sidokare?	Mekanismenya dari pertama pengajuan itu kita menyusun RKKD. Kemudian disertai dengan RAB baik fisik maupun non fisik. Kemudian disertai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen RKP dan APBDes.
4.	Bagaimana prosedur penatausahaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare?	Kalau penatausahaannya itu ya sesuai dengan pedoman dana desa. Itu biasanya pedom dikeluarkan tiap tahun, ada perbedaan tiap tahunnya itu tidak begitu banyak atau signifikan. Kemudian dalam pedom tersebut kalau

		penatausahaan itu sudah muncul di aplikasi tadi siskedes. Ada perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan lain sebagainya.
5.	Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Seperti yang tadi awal saya bilang untuk sistem pelaporannya pun sekarang menggunakan siskedes. Jadi dana itu sudah dikontrol langsung oleh pusat.
6.	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare?	Untuk hambatan itu tadi pemahaman aplikasinya. Penguasaan aplikasi itu tidak satu tahun dua tahun. Kemudian dari aparatur pemerintah desanya dalam artian SDM.
7.	Bagaimana pengendalian atau tindakan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dana desa?	Jadi, untuk pengendalian atau tindakan yang dilakukan dari pemerintah desa sendiri ini saling koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik dengan TPK, kemudian TPHP, kemudian pihak Kecamatan, pendamping desa, maupun DINPERMASDES selaku Pembina aparatur desa.
8.	Bagaimana bentuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan pembangunan desa?	Evaluasi biasanya dilakukan monev. lalu kinerja perangkat desa itu biasanya ada pembinaan dari Pak kepala desa, diadakan staf meeting. Kalau dari Kecamatan ataupun DINPERMASDES itu biasanya ada jadwal rutin, untuk istilahnya, apa ya, penilaian terhadap kinerja perangkat desa.
9.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare pada pengelolaan dana desa?	Ini bentuk pengawasannya itu kan tadi seperti saya bilang, itu ada monev. Monev tersebut nanti disitu dihadirkan TPK selaku tim pengelola kegiatan, kemudian TPHP, TPHP itu tim pemeriksa hasil kegiatan. Kemudian dari lembaga-lembaga terkait seperti BPD, kemudian LPMD itu dilibatkan dalam monev. Nah kemudian tim monev dari Kecamatan

		<p>sendiri pun mereka mengajak serta PD pendamping desa dan juga PLD pendamping lokal desa. Lalu dari pihak Kecamatan sendiri biasanya kasih yang <i>membidang</i> pengelolaan dana desa tersebut. Kemudian dalam monev tersebut nanti dituangkan, ada berita acaranya, sesuai apa nggak baik itu fisiknya maupun secara administrasi.</p>
10.	<p>Apakah pembangunan desa Sidokare tahun 2022 sudah terealisasi semua?</p>	<p>Kalau untuk pembangunannya sudah terealisasi semua, tapi ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan karena ini kan akhir tahun, jadi kalau fisiknya sudah selesai semua, tinggal non fisik kemudian sama yang satunya lagi BLT. BLT itu bulan ke empat itu Desember, November sama Oktober. Kalau dari dana desa sendiri untuk penanggulangan covid ada 8% dari total anggaran dana desa itu sudah ada sendiri 8%. Kemudian untuk BLT nya juga bervariasi dari tahun ke tahun. Dulu pernah hampir 60% 50% untuk BLT. Tapi, untuk tahun ini itu diwajibkan 40% (penerima) untuk BLT.</p>

Nama Narasumber : Bu Ulya Wusiro Solikhati

Jabatan : Kaur Keuangan/Bendahara

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme pelaporan dana desa pada pemerintah desa Sidokare?	Untuk proses pelaporan dana desa, yang pertama setelah pelaksanaan sudah selesai itu yang dikumpulkan kwitansi-kwitansi pembelian, pembayaran upah pekerja, tidak lupa dokumentasi berupa tanda tangan pekerja dan foto. Nanti juga ada evaluasi diakhir oleh Kepala Desa.
2.	Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Prosedur laporan pertanggungjawaban yang pertama, yang pasti akan bertanggungjawab itu Pak Kades selaku yang bertanggungjawab. Nanti dibawahnya ada Pak Sekdes sebagai koordinator. Terus ada Kaur Keuangan sebagai penatausahaan. Kasi Kesra sebagai pelaksana dilapangan untuk pembangunan. Terus Kaur Perencanaan selaku perencanaan sebelum dan sesudah. Ada tim TPK itu pada saat pembangunan dilaksanakan. Yang terakhir ada tim TPHP untuk mengetahui kualitas yang dibangun untuk pembangunan fisik.
3.	Apa saja laporan pertanggungjawaban yang dibuat bendahara dalam pengelolaan dana desa?	Ya mulai dari (laporan) uang yang diambil dari bank itu berapa. Terus yang digunakan untuk pembelian, uang keluar untuk pengadaan dan pembelian. Setelah itu, tidak lupa juga untuk ada (laporan) bayar pajak sesuai dengan aturan, ada pajak PPN, PPH. Kalau laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kita ambilnya bertahap. Kalau dana desa dibagi menjadi

		<p>tiga tahap, jadi tiga laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu dilaporkan ke Kecamatan. Setelah di Kecamatan nanti akhirnya dilaporkan juga ke DINPERMASDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).</p>
4.	<p>Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa Sidokare dalam pengelolaan dana desa?</p>	<p>Diawal biasanya sudah dicetak Alokasi Dana Desa yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kalau disini ditempelkan didepan nanti bisa dicek dipapan informasi. Terus untuk pembangunan fisik biasanya sudah terpasang papan pembangunan dan setelah jadi nanti ada prasastinya. Selain itu juga biasanya kalau di Pemerintahan Desa itukan pakainya swakelola yaitu tenaga kerja warga dari desa sendiri.</p>
5.	<p>Apa saja hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa?</p>	<p>Hambatannya biasanya Rencana Belanja kadang kurang sesuai dengan pelaksanaan karena ada kenaikan harga, pasti itu kendalanya perubahan. Pelaporan harus mengikuti perubahan dulu baru bisa dianggarkan. Terus pengumpulan data-data, data-data kan banyak mengikuti kwitansi itu juga untuk pengumpulannya butuh waktu yang lebih. Pelaporan emang rata-rata tidak tepat waktu, karena kan untuk mengumpulkan data-data itu tidak sedikit, apalagi untuk pembayaran pajak. Untuk pelaksanaannya insyaAllah sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja juga.</p>

Nama Narasumber : Ibu Mustika Setyaningrum

Jabatan : Kaur Perencanaan

Tanggal Wawancara : 16 November 2022

Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana laporan perencanaan yang dibuat pemerintah desa Sidokare terkaur pengelolaan dana desa?	Berarti untuk laporannya itu, laporan perencanaan itu berupa PERDES (Peraturan Desa) yaitu berbentuk seperti rancangan kegiatan pembangunan dan rencana belanja kegiatan.
2.	Apakah ada hambatan dalam penyusunan perencanaan pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare?	Kalau selama ini <i>ndak</i> ya, Cuma kadangkannya untuk warga pingin didahulukan. Misalkan RT segini pingin didahulukan. Cuma kan kadang kita lihat prioritasnya yang paling urgent yang mana, kayak gitu.

Nama Narasumber : Bapak Sonhaji

Jabatan : Ketua BPD Desa Sidokare

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Rumah Bapak Sonhaji

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran BPD dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare?	Ikut mengawasi dalam pelaksanaan proyek apapun. Baik itu dana desa atau dana sumber lain dari provinsi dan sebagainya. Jadi, mengawasi. Dalam pengawasan itu kalau misalnya sebuah proyek itu kan ada yang namanya TPK, kemudian ada pendamping desa dan sebagainya. Jadi, masing-masing kegiatan itu kan dalam 1 tahun itu ada yang namanya pengawasan itu. Nah dari proyek itu yang diajukan nanti diverifikasi mana yang lebih utama dalam pelaksanaan itu. Dalam verifikasi itu nanti, sebelumnya prosesnya kan ada musyawarah dusun (musdus), kemudian dari musdus naik menjadi musyawarah desa (musdes), dari musdes nanti naik lagi menjadi musrenbangdes. Nah setelah itu di verifikasi dana manapun yang cair, nanti baru yang diutamakan lebih dulu. Untuk masalah anggaran berarti kan dari sana sudah ada plotnya masing-masing. Jadi, kita hanya mengawasi. Jadi kalau misalnya proyek nanti diakhir itu ada yang namanya monev. Nah BPD pun ikut ketika sudah 100% dimonev oleh Kecamatan. Biasanya dari Pak Sekdes, dari Tim Kecamatan dan sebagainya. BPK dalam mengawasi itu kan ada TPK,

		<p>kemudian ada dari pedamping desa, nah nantikan dalam pelaksanaan itu sesuai nggak dengan peraturan itu misalnya proyek sekian dan sebagainya.</p>
2.	<p>Bagaimana peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa Sidokare?</p>	<p>Nah itu, kan ada musdus dari musdus, kemudian disini kan ada dusun Sidokare Selatan sama Utara. Hasil dari musdus itu kemudian di musdeskan. Nah dari musyawarah desa itu nanti kemudian di musrenbangdesakan. Jadi, intinya proyek apapun atau yang diutamakan keputusannya nanti dari musrenbangdes itu. Jadi, kalau di musrenbangdes kemudian ke Kabupaten proyek itu yang lebih diprioritaskan. Awalnya kan begini, masing-masing RT mengajukan apa, kan gitu, makanya namanya musyawarah dusun. Setelah nanti diprioritaskan nanti dimusrenbangdeskan. Sebetulnya rumit juga, makanya kan kalau ada musdus kemudian ditingkatkan menjadi musdes ya biasanya eyel-eyelan. Kan ada yang misalnya sudah dimusdeskan sudah 2 tahun ternyata karena anggaran sekarangkan ada ini ada pengurangan, seperti kemarin ada covid dan sebagainya yang harus digunakan untuk penanganan covid. Sehingga banyak program yang secara fisik tertunda. Jadi karena yaa itu, dengan adanya covid anggaran jadi berubah-ubah. Jadi harus sekian persen untuk fisik kemudian tambahan non fisik dan sebagainya. Jadi, anggaran itu sudah presentasinya sudah dari pemerintah.</p>

3.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pengelolaan dana desa?	Laporannya dari LPJ. Jadi, dana desa misalnya kan dalam 1 tahun rencananya begini-begini, nanti ada ini laporannya. Misalnya, untuk laporan sekian persen dan sebagainya. Dari kita hanya melihat dari desa. Berarti kan ada laporan misalnya anggaran sekian-sekian, nah kita melakukan musyawarah desa dan perangkat desa. Nanti kami, ketua BPD laporan dari desa kemudian di musyawarahkan dan sebagainya, kami tinggal mempelajari LPJ (laporan pertanggungjawaban).
4.	Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Yaa paling kendalanya itu, misalnya program tahun ini, eh ternyata anggaran dari pemerintah untuk tahun kedepannya. Jadi, banyak program yang seharusnya tahun ini misalnya harus selesai, ternyata anggaran dari sana ada pengurangan dan sebagainya. Jadi, kendalanya hasil daripada musdes belum tentu direalisasikan, itu kendalanya.

Nama Narasumber : Bapak Imam Prasetyo

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Rumah Bapak Imam Prasetyo

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak pernah mengikuti musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan desa?	Ya setiap musdes saya ikut, karena saya ikut didalamnya sebagai KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
2.	Apa saja peran masyarakat dalam perencanaan desa?	Peran masyarakat yaitu ikut mengawasi bagaimana perkembangan atau pembangunan desa, terutama desa-desa yang perlu kita prioritaskan untuk mendapatkan pembangunan tersebut. Misalkan pada jalanan yang tidak layak atau rusak itu kadang sebagai masyarakat tentunya untuk mengajukan atau mendukung pembangunan di desanya.
3.	Bagaimana masyarakat melaporkan bentuk penyimpangan pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare?	Di desa masing-masing pasti sering terjadi adanya penyimpangan yang mungkin dari pembangunan yang tidak memenuhi spesifikasi. Ya adanya kurang kuatnya hasil pembangunan, misalkan pada jalan aspal, bangunan gedung itu sering. Ya kita paling melapor pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
4.	Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat terhadap anggaran desa Sidokare?	Kebetulan saya di desa Sidokare itu juga sebagai TPHP (Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan) kalau di dana desa. Terus kalau di ADD atau provinsi atau bantuan yang lain sebagai TPK. Saya sebagai TPHP dan TPK setiap ada pembangunan saya sering mengawasi yang memang sudah tugas saya. Makanya saya berperan aktif di dana desa tersebut dalam pengawasan pembangunan desa. Saya sebagai TPHP akan

		berkoordinasi dengan Tim Kecamatan untuk memperbaiki atau mengembangkan, misalkan ada dana yang tersisa, kita kembangkan untuk apa itu bisa.
--	--	--

Lampiran 7. Laporan APBDesa

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Dana Desa Bidang Pembangunan
 Pekerjaan : Pembangunan Jalan Telford
 Sumber dana : Dana Desa
 Tahun anggaran : 2021
 Lokasi : RT 04 / RW 01
 Desa : Sidokare
 Kecamatan : Ampelgading
 Kabupaten : Pematang

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3		4	5	6 = 3 x 5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lapangan	150,00	m2	A.2.2.1.9	14.000,00	2.100.000,00
					Jumlah I	2.100.000,00
II	PEKERJAAN TELFORD					
	Volume 500,00 m					
1	Lapis Pondasi Bawah (LPB) Telford	200,00	m3	K-515	381.537,50	76.307.500,00
2	Pek. Urugan Tanah	380,00	m3	A.2.3.1.11.a	100.960,00	38.365.600,00
					Jumlah II	112.653.100,00
III	PEKERJAAN TALUD					
	Volume 200,00 m					
1	Galian tanah/m3	18,00	m3	A.2.3.1.1	70.000,00	1.260.000,00
2	Urug Kembali	5,28	m3	A.2.3.1.9	50.000,00	264.000,00
3	Pas Batu kals 1:4/m3	65,00	m3	A.3.2.1.2	858.452,00	55.799.400,00
4	Plester 1:4/m2	90,00	m2	A.4.4.2.3	60.428,50	5.438.600,00
5	Pek. Sieran 1:2/m2	120,00	m2	A.4.4.2.2b	55.789,20	6.694.700,00
6	Pek. Sulingan	7,50	btg	Dht	48.000,00	360.000,00
					Jumlah III	69.676.700,00
					Jumlah I s.d III	184.429.800,00
IV	BOP					5.532.900,00
1	BOP*	1,00				5.532.900,00
					Jumlah IV	5.532.900,00
					Jumlah I s.d IV	189.962.700,00
					DIBULATKAN	189.962.700,00

Kasi Kesejahteraan Desa Sidokare
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang

Mengetahui
Kepala Desa Sidokare
KUSWONO

NURDIANTO

KEPALA DESA
SIDOKARE
KUSWONO

Lampiran 9. Buku Pembantu Kas

BUKU BANTU KAS
KEGAIKATAN DANA DESA TAHAP 1
DESA SIDOKARE KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TARIK ANGGARAN 2021

Kepala Desa : KUSNONG
 Bendahara : MUSTIKA SETYANINGRUM
 Baku : ME
 Tahun Anggaran : 2021

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Tersisa Saldo Awal					
2	05/05/2021		Pengambilan DD Tahap 1	250.000.000				250.000.000
5	05/05/2021	2.2.2	Penyenggaraan Poyandu (Makanan Tambahan, Kilo Ibu Hamil, Kiloan Lansia, Jerserif Kader Pospayudu) PMT Ibu Hamil 36 org 2 bln 25.000 1.800.000 PMT Bakti 1236 org 1 7.000 8.652.000 Honor Kader Pospayudu 30 org 5 bln 50.000 9.000.000		19.452.000		19.452.000	240.548.000
6	05/05/2021	2.2.1	Penyenggaraan Per Kesehatan Desa (PKD)/Fondas Milk Desa (Obat-obatan, Tambahan Isotref Biotin Desal/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan NB dan Alat Kesehatan bagi Honor SDO 1 org 6 bln 250.000 1.500.000 Honor KPM 1 org 6 bln 150.000 900.000		2.400.000		21.852.000	238.748.000
7	05/05/2021	2.1.1	Penyenggaraan PAUD/ITPA/TPA/TPC/Modrasah Non-Formal Milk Desa* (Bantuan Honor Perawat, Pakan, Seragam, Operasional) Honor Guru PAUD dan TK 48 GB 100.000 4.800.000		4.800.000		26.652.000	233.948.000
8	05/05/2021	5.2	Pengembangan Sistem Informasi Desa Honor Tim SD 3.450.000 Selang, Jasa Internet buln, Januari s.d Mei 2.462.500		5.912.500		32.564.500	228.035.500
9	05/05/2021	2.1.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Prasarana Jalan Desa (Telorod dan Telorod) Selang, Modal dan Bahan 122.798.800 Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Prasarana Jalan Desa (Telorod dan Telorod) 81.670.000		189.967.700		222.527.200	37.472.800

Lampiran 10. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA SIDOMARE KECAMATAN AMPELGADING
TAHUN ANGGARAN 2021

BILAJI : Mei 2021
NAMA BANK : Bank Jaring
NO. REK. : 211007959

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran		Saldo (Bayan)
				Saluran (Rp)	Tempa Bank (Rp)	Pemilihan (Rp)	Pajak (Rp)	
1	20/04/2021	Prorata Saldo		825.695.420,00	157.392,00	257.897.050,00	0,00	567.898.370,00
2	04/05/2021	BLT Bulan 1	0005/79/11.2015/2021	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	582.898.370,00
3	05/05/2021	Memorandum Slip Bulan Mei	0010/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	22.070.000,00	0,00	560.828.370,00
4	05/05/2021	Memorandum SP2 Keseluruhan Bulan Mei	0015/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	1.294.320,00	0,00	559.534.050,00
5	05/05/2021	Pengembalian 10 Tagap 1 Non BLT	0020/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	200.200.000,00	0,00	359.334.050,00
6	05/05/2021	Pengembalian SP2 Agak Tertag 2	0021/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	36.450.000,00	0,00	322.884.050,00
7	05/05/2021	Penyetoran Pengisian SP2 Keseluruhan Bulan Mei	0022/04/W/11.2015/2021	193.000,00	0,00	0,00	0,00	323.077.050,00
8	07/05/2021	Pemenuan Dana ACO Tagap II	0005/79/11.2015/2021	117.942.800,00	0,00	0,00	0,00	441.019.850,00
9	15/05/2021	Memorandum SP2 Keseluruhan Bulan Mei	0025/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	133.000,00	0,00	440.786.850,00
10	20/05/2021	Pengembalian Dana 10 Tagap 1 (Pmk)	0027/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	393.786.850,00
11	20/05/2021	Pengembalian Dana BLT Bulan Januari	0028/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	378.786.850,00
12	20/05/2021	Pengembalian ACO Tagap II	0029/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	63.237.000,00	0,00	315.549.850,00
13	23/05/2021	Saldo Akhir Mei Bulan Mei	0030/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	315.549.850,00
14	24/05/2021	Pendataan Biaya Bank bulan Mei	0034/04/W/11.2015/2021	0,00	148.617,00	0,00	0,00	166.932.850,00
15	24/05/2021	Pajak Biaya Bank bulan Mei	0035/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	166.932.850,00
16	04/06/2021	Memorandum Slip Bulan Juni	0010/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	22.070.000,00	0,00	144.862.850,00
17	04/06/2021	Memorandum SP2 Keseluruhan Bulan Juni	0015/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	1.294.320,00	0,00	143.568.530,00
18	04/06/2021	Pemenuan Pengisian SP2 Keseluruhan Bulan Juni	0020/04/W/11.2015/2021	153.000,00	0,00	0,00	0,00	143.721.530,00
19	10/06/2021	Pengembalian Dana ACO Tagap II	0024/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	131.121.530,00
20	10/06/2021	Pengembalian Dana 10 Tagap I	0027/04/W/11.2015/2021	0,00	0,00	510.750,00	0,00	130.610.780,00


14/07/2021 11:09:01

Lampiran 11. Laporan Kesepakatan Bersama Tentang APBDes


LAMPIRAN BERITA ACARA
 NOMOR : 145 / 6 / 2021
 NOMOR : 144 / 6 / BPD / 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SIDOKARE DAN BADAN PENUSYANAKATAN DESA SIDOKARE
TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOKARE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022 MENUJUD PERATURAN DESA

NO	URAIAN	PENGALUAN RANCANGAN OLEH KEPALA DESA		KESEPAKATAN PENETAPAN OLEH BPD		KETEBANGAN
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5		
1	PENDAPATAN DESA	Rp 1.821.218.267	Rp 1.821.218.267			
2	BELANJA DESA	Rp 1.811.218.267	Rp 1.811.218.267			
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000			
3	PENYAMBANGAN DESA					
	3.1. FENOMENA PENYAMBANGAN	Rp -	Rp -			
	3.2. PENGELUARAN PENYAMBANGAN	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000			
	PENYAMBANGAN NETTO	Rp (10.000.000)	Rp (10.000.000)			
	SALPA	Rp -	Rp -			

Sidokare, 27 Desember 2021



KEPALA DESA SIDOKARE
KUSWONO



KETUA BPD SIDOKARE
Drs/Sonhali

Lampiran 12. Laporan Bukti Pengeluaran

PEMERINTAH DESA SIDOKARE KABUPATEN PEMALANG		TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
		NOMOR : 00116/KWT/11.2015/2021	Sumberdana : DDS
Sudah diterima dari	: KAUR KEUANGAN		
Uang sebesar	: Rp. 9.000.000,00		
	== Sembilan Juta Rupiah ==		
Sebagai pembayaran	: Honorarium Kader Posyandu bulan Januari s/d Juni		
Kegiatan	: 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lemala, Insentif)		
Rek. Belanja	: 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		
Catatan Keuangan	: Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :		
	Nilai	: Rp.	9.000.000,00
	Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
	Pot Pajak PPh	: Rp.	540.000,00
	Pot Lainnya	: Rp.	0,00
	Dibayarkan	: Rp.	8.460.000,00
Yang Memberi, KAUR KEUANGAN		SIDOKARE, 05 May 2021	Yang Menerima,
MUSTIKA SETYANINGRUM		<i>Tersampir</i>	TITIS ROSYIDAH
			
07/05/2021 10:18:09			

Lampiran 13. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA SIDOKARE TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.195.346.000,00	433.138.400,00	762.207.600,00
4.2.1.	Dana Desa	1.195.346.000,00	433.138.400,00	762.207.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.195.346.000,00	433.138.400,00	762.207.600,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.158.550,00	173.354.930,00	128.803.620,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	141.035.850,00	105.067.430,00	35.968.420,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	92.025.000,00	52.105.000,00	39.920.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.910.000,00	2.482.500,00	3.447.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	56.887.700,00	7.420.000,00	49.467.700,00
5.3.	Belanja Modal	689.038.900,00	228.462.700,00	460.576.200,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	325.353.200,00	189.962.700,00	135.390.500,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	295.233.400,00	10.500.000,00	284.733.400,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	29.452.300,00	0,00	29.452.300,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	184.148.550,00	31.300.000,00	152.848.550,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	184.148.550,00	31.300.000,00	152.848.550,00
	JUMLAH BELANJA	1.175.346.000,00	433.117.630,00	742.228.370,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	20.770,00	19.979.230,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	0,00	(20.000.000,00)
	SISA LEBBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	20.770,00	(20.770,00)

SIDOKARE, 25 July 2021
 KEPALA DESA

 KUSWONO

Lampiran 14. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. DATA DIRI**

Nama : Umi Khafifah Finayanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Pernalang, 20 Juli 2000
Alamat : Dusun Utara Rt/Rw 22/05 Sidokare,
Kecamatan Ampelgading, Kabupaten
Pernalang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : fifahkhafifah20@gmail.com

B. PENDIDIKAN

- MI : 2006-2012 MI Islamiyah Sidokare
- SMP : 2012-2015 SMP Negeri 3 Comal
- SMK : 2015-2018 SMK Islam Nusantara Comal

Pernalang, Januari 2023

Penulis



Umi Khafifah Finayanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UMI KHAFIFAH FINAYANTI
NIM : 4318116
Jurusan : AKUNTANSI SYARIAH
E-mail address : fifahkhafifah20@gmail.com
No. Hp : 085747105914

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2023



UMI KHAFIFAH FINAYANTI
NIM. 4318116